

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur



<ul style="list-style-type: none"> 15. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 	
Keterikatan SOP	Peralatan/Perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyuluhan Pembentukan dan Pendirian Koperasi 2. SOP Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Koperasi UKM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Internet 3. Alat Tulis 4. Printer 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
<p>Apabila SOP ini tidak dilakukan maka izin advokasi tidak dapat diterbitkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Identitas Koperasi 2. Data Pendukung Lain

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur



SOP Advokasi Penyelesaian Permasalahan Koperasi


No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Kepala Dinas	Analisis kebijakan	Analisis Koperasi	Pengawas Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Masyarakat /Anggota Koperasi, UMKM, dan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah, Dinas Kab/Kota atau yang mengajukan permohonan	○					Surat permohonan	15 menit	Surat diterima dinas	
2.	Menerima berkas dari pemohon, secara langsung atau elektronik				□		Surat permohonan	15 menit	Surat diterima dan diteruskan ke pimpinan	
3.	Menelaah surat masuk dan memberikan disposisi			□			Surat permohonan	15 menit	Surat Permohonan diterima pimpinan	
4.	Menelaah disposisi dan menindaklanjuti disposisi kepada staf		□				Surat permohonan	15 menit	Surat permohonan ditelaah dan ditindaklanjuti	
5.	Melakukan analisis dan tindak lanjut surat dari pemohon			□			Komputer, ATK, printer dan hasil pemeriksaan	30 menit	Telaah staff	
6.	Melaksanakan koordinasi dengan pemohon				□		Dokumen hasil koordinasi	60 menit	Laporan hasil koordinasi	
7.	Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan koperasi			□			Dokumen hasil penyelesaian	360 menit	Berita acara hasil fasilitasi	
8.	Membuat laporan hasil dan melakukan pengawasan sewaktu waktu sesuai dengan permenkop 9 tahun 2020 pasal 9					○	laporan penyelesaian permasalahan	1 hari	Hasil laporan	

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur

Dr. Andromeda Qomariah, M.M.
NIP. 19680117 199403 2 003



5.3.4 SOP Pendampingan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

 <p>Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Koperasi dan UKM</p>	Nomor SOP	:	008.3.3/115.2/1409.3/2024
	Tanggal Pembuatan	:	15 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	31 Januari 2024
	Disahkan oleh	:	Kepala Dinas
	Nama SOP	:	Pendampingan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi 11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi 12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi 14. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mengetahui semua proses pelayanan secara umum 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Pendidikan minimal lulusan Sarjana (S1)/Ekonomi, Manajemen, Sosial